

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait evaluasi penerapan Analisis Standar Belanja pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka, Hasil penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan pedoman Analisis Standar Belanja sebagai instrumen penilaian kewajaran atas beban kerja yang harusnya telah digunakan pada dinas Pekerja Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka sehingga dapat meminimalisir pengeluaran yang kurang jelas belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai format atau komponen yang ada didalamnya.
2. Berdasarkan definisi ASB yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 298 ayat 3 menjelaskan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, format atau Model ASB yang digunakan pada Dinas PUPR-PRKP dengan model yang telah dikembangkan dan berguna pada setiap kegiatan belanja yang dilaksanakan akan sesuai dengan kebutuhan riil.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termaksud tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan biaya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Untuk mengantisipasi perubahan gaji pokok dan tunjangan keluarga dalam tahun anggaran dapat disiapkan acress sebesar 2,5%, Khusus tunjangan beras bagi PNSD untuk tahun anggaran dalam bentuk natura atau uang, Penganggaran belanja gaji untuk kebutuhan pengangkatan CPNSD dan gaji bulan ke-13 dan gaji keempat belas dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat unyuk meningkatkan kesejatraan PNSD melalui perubahan gaji pokok dan Perhitungan gaji PNSD pada setiap SKPD secara teknis akan dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah.
4. Pemberian honorarium dan standar biaya bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang digunakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Hal tersebut telah diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Dalam menyusun anggaran Belanja awalnya harus membuat dokumen RKA-SKPD terlebih dahulu sebelum membuat DPA-SKPD yang

memuat total belanja dan akan digunakan. Rancangan kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD. Proses penyusunan RKA pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka telah sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 bagian lima Pasal 93 mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setelah penyusunan RKA-SKPD yang memuat rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran dapat melanjutkan Penyusunan DPA-SKPD yang memuat total belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan atau yang akan digunakan oleh pengguna anggaran.

6. Pada Dinas PUPR-PRKP dalam penyusunan DPA-SKPD sebagai dokumen Pelaksanaan anggaran selalu mengalami perubahan dari tahun 2017-2019, sehingga Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran atau DPPA-SKPD yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran akibat Perubahan analisis standar belanja dan standar biaya hal ini juga telah diatur pada Permendagri No 13 tahun 2006 bagian ketiga Pasal 160 mengenai Pergeseran Anggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka perlu melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis atau bimbingan teknis kepada para pengawainya mengenai Analisis Standar Belanja agar dapat memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan dalam menyusun anggaran dalam menggunakan Analisis Standar Belanja
2. Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka perlu teliti dalam pembuatan RKA-SKPD yang telah sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 bagian lima Pasal 93 mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Untuk kepala daerah atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan kebijakannya dalam pergeseran anggaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan penyesuaian standar belanja, hal ini berpengaruh pada terhadap ASB yang telah ada perlu disesuaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014
- Erlina, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA | Omar Sakti Rambe, SE., Ak., CA.
| Rasdianto, M.Si., Ak., CA *Akuntansi Keuangan Daerah. Berbasis akrual*
Berdasarkan PP NO. 71 Tahun 2010 dan Permendagri NO. 64 Tahun 2013
- Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga
- Jurnal KRISNA : *Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 11, No 2 Januari 2020. pp. 197-205 ISSN: 2301-8879, E-ISSN: 25991809
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rasyidah, Muhammad Ridwan Arif, dan Fatmawati. (2020) . *Modelling Analisis Standar Belanja dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan)*
- Rintonga, Irwan Taufiq. (2010). Analisis Standar Belanja Konsep, metode pengembangan dan Implementasi di pemerintah Daerah
- Ryo Maradhona. (2010) . *Analisis Implementasi Analisis Standar Belanja(ASB) Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Madiun*. Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret

Satori Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat (3): Belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung